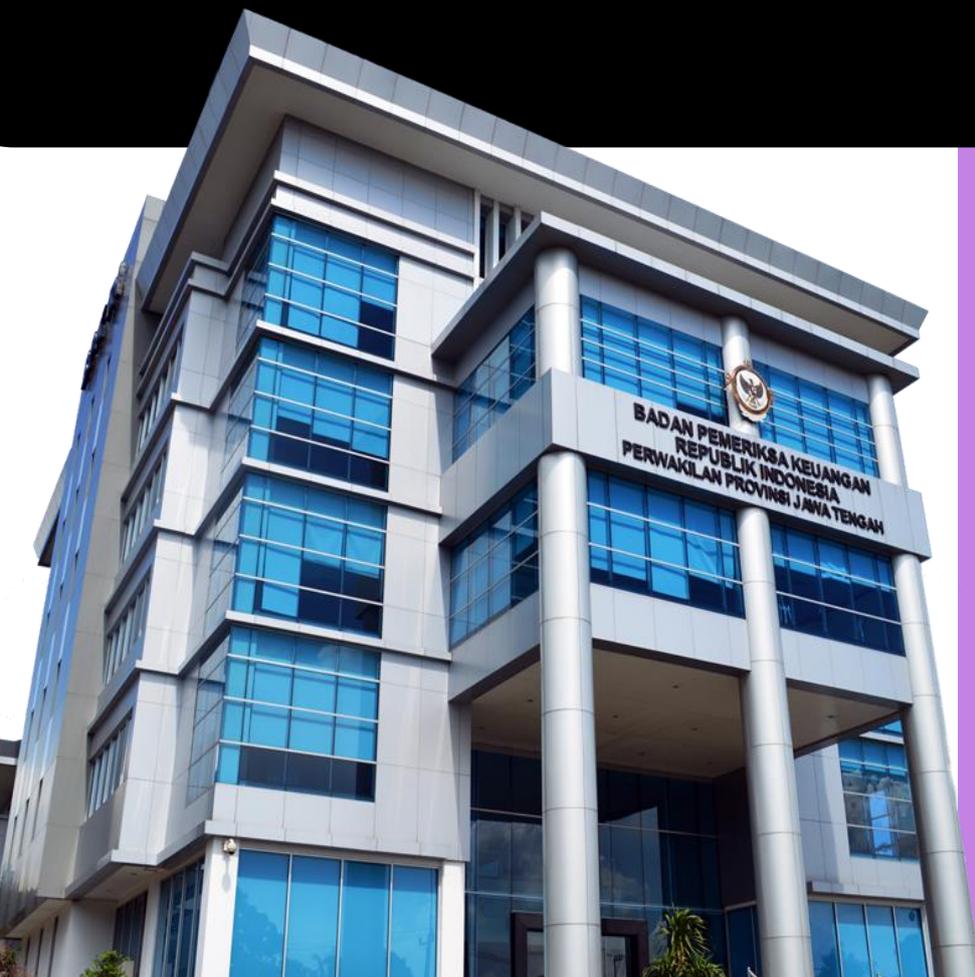




LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2022



INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	6
E. Isu Strategis	6
BAB II Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	6
A. Perencanaan Strategis Tahun 2022	8
B. Target Kinerja Tahun 2022	9
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	16
A. Hasil Evaluasi AKIP.....	16
B. Capaian Kinerja	16
C. Capaian Kinerja Organisasi	17
D. Analisis Efisiensi	37
E. Perubahan Budaya Kerja	38
F. Realisasi Kinerja Anggaran	39
G. Inovasi	40
H. Penghargaan	40
BAB IV Penutup	41

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Target Indikator Kinerja dalam Lima Tahun sesuai RENSTRA
3. Berita Acara Validasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan "Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022".

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini menyajikan pencapaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kerjanya dalam lingkup Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memerhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memerhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan memerhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Semarang, 31 Januari 2023
Kepala Perwakilan,



Hari Wiwoho
NIP. 196810011996031003

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah system pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbarui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020-2024. Output dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I dan LAKIN BPK Tahun 2021.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada

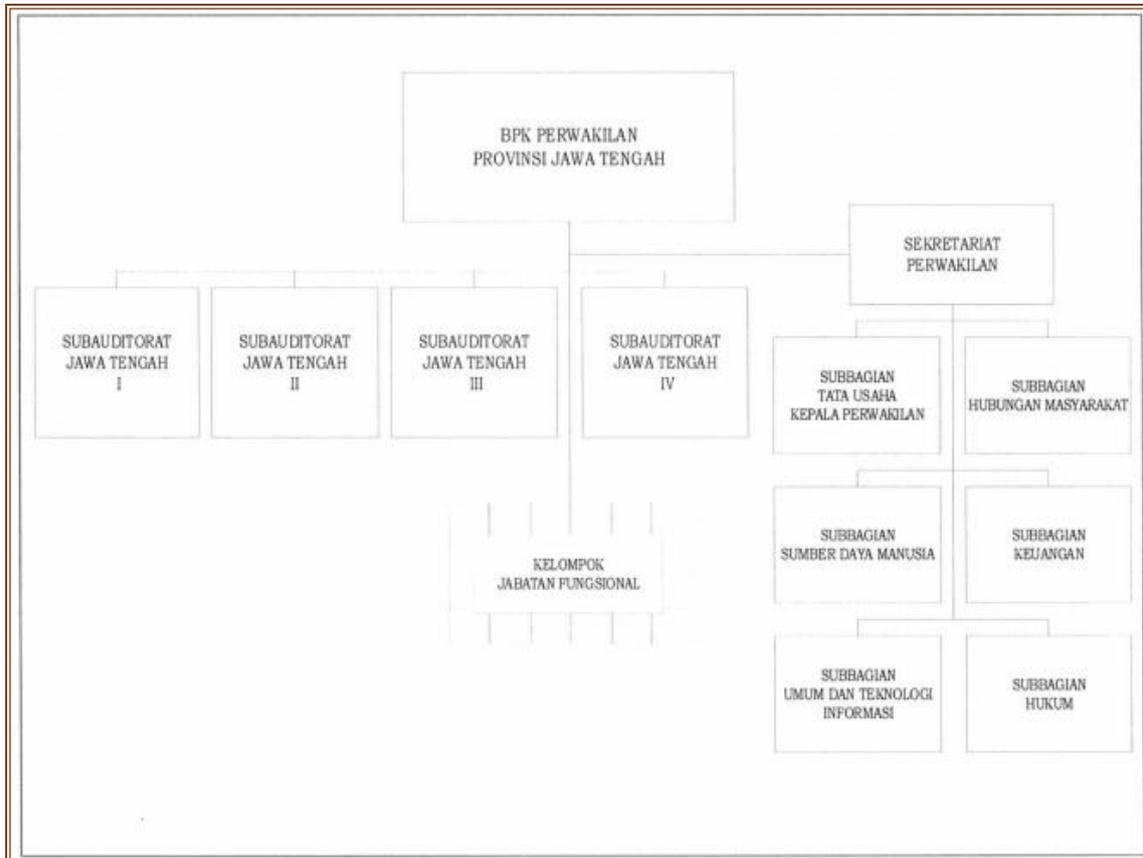
di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Perwakilan dan juga mengoperasikan Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon III sebagai berikut:

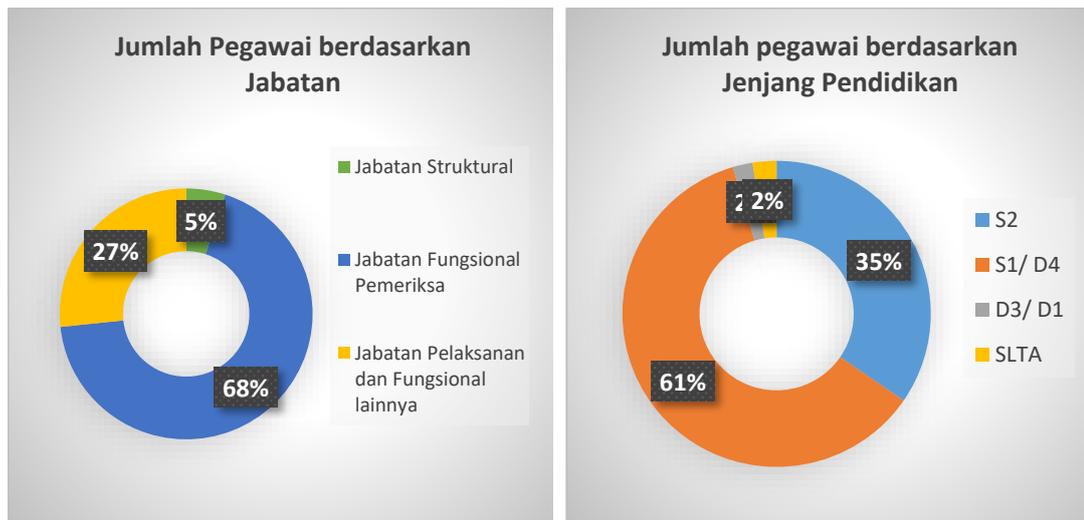
<p style="text-align: center;">Sub Auditorat Jateng I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi • Lingkup Pemeriksaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas 	<p style="text-align: center;">Sub Auditorat Jateng II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi • Lingkup Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas
<p style="text-align: center;">Sub Auditorat Jateng III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi • Lingkup Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas 	<p style="text-align: center;">Sub Auditorat Jateng IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi • Lingkup Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas
<p style="text-align: center;">Sekretariat Perwakilan</p> <p>Tugas : menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Susunan organisasi : Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Hubungan Masyarakat, Subbagian Hukum, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi</p>	

Gambar 1.2- Penjabaran tugas dan lingkup Eselon III

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah per 31 Januari 2023 berjumlah 239 Pegawai Tetap (terdiri dari 12 pejabat struktural, 162 pejabat fungsional pemeriksa, serta 65 staf dengan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lainnya) dan 31 Pegawai Tidak Tetap.



Gambar 1.3- Komposisi Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

2. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp43.248.581.000,00 dengan target 625 output. Anggaran ini turun 8,49% dari tahun sebelumnya Rp47.261.846.000,00.

Selama Tahun 2022, dilakukan penyesuaian dengan revisi DIPA sehingga anggaran bertambah menjadi Rp44.837.781.000,00 dengan target 647 output.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Isu strategis tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- Pemeriksaan Kinerja Pembangunan Pansimas pada dua entitas pemeriksaan
- Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pariwisata pada dua entitas pemeriksaan

- c. Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur pada dua entitas
2. Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Sesuai GUID 5270-*Guideline for the Audit of Corruption Prevention*, program antikorupsi utamanya berfokus pada 3 elemen utama yakni pencegahan (*prevention*), deteksi (*detection*), dan reaksi (*reaction*). Adapun peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi ini dapat dibagi menjadi empat kegiatan yaitu:

Dilaksanakan oleh AKN / Perwakilan	Dilaksanakan oleh Auditorat Utama Investigasi (AUI)
a. Pencegahan	c. Investigasi
b. Pendeteksian	d. Dukungan Litigasi

Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut di atas, BPK perlu menyusun Inisiatif Strategis (IS) “Peningkatan Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pengembangan Strategi Pencegahan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara”. Proses perumusan IS ini mendasarkan pada Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 serta Arah Kebijakan BPK yaitu arah kebijakan pertama “peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan”, pada Strategi 2 yaitu “meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”. Pengampu IS ini adalah AUI namun dalam pelaksanaan IS ini diperlukan sinergi dan kerja sama dengan seluruh unit kerja lain di BPK baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan.

Salah satu aktivitas IS 2.2 adalah penguatan Sistem Pencegahan Korupsi di Entitas yang terdiri dari kegiatan Reviu Sistem Pencegahan Korupsi di entitas melalui Pemeriksaan Non Investigatif, Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional dan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK dan AN PK), Pemberian pendapat atas Kebijakan Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Fraud Awareness Training bagi entitas. Kegiatan reviu sistem dan pemeriksaan kinerja Stranas PK dan AN PK dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik BPK tahun 2022 yang dikelompokkan pada pemeriksaan tematik Prioritas Nasional (PN) 7 khususnya Program Prioritas (PP) 3 Penegakan Hukum Nasional. Pemeriksaan tematik yang dilaksanakan adalah ***pemeriksaan efektivitas sistem pencegahan korupsi dan Stranas PK***.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Perencanaan Strategis

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan perencanaan RPJMN 2020-2024 di mana pada periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dengan periode RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyusunan Renstra BPK 2020-2024 di samping menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah juga dituntut untuk selalu tanggap dan responsif atas isu-isu aktual. Karena itu, Renstra BPK 2020-2024 selain menyesuaikan dengan periode RPJMN juga telah merespons dampak bencana pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik, yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker. Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Sejak Tahun 2018, pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi PRISMA yang dikembangkan Direktorat PSMK bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi. Aplikasi ini dalam tahap pengembangan modul kinerja pegawai dan manajemen risiko.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

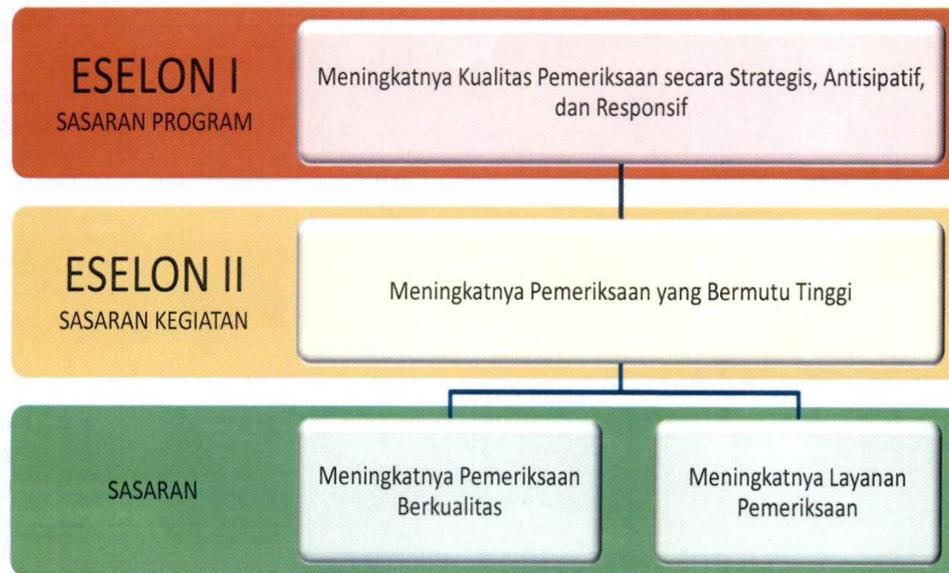
Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2022. Indikator kinerja dan target kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) serta para Pimpinan BPK RI.

Untuk lebih jelasnya, berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022:



Gambar 2.2 Peta Strategis Tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2020-2024, BPK menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja yang bekerja secara online serta berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, sejak Tahun 2018, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA).

Siklus Pengukuran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik. Data yang diinput tersebut adalah data yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker.

Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memperbandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja.

Tabel 2.1
INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2022

Sasaran Kegiatan , Sasaran dan Anggaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Sasaran: <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan 	Rp44.837.781.000,00	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,00%

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2022

Rencana Aksi menyajikan aktivitas utama per triwulan dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dokumen rencana aksi unit kerja. Pada bagian ini hanya dijelaskan secara umum atas pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian setiap indikator kinerja yang diampu oleh unit/satuan kerja. Rencana Aksi secara detail dalam bentuk tabel menjadi lampiran laporan ini.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

TAHUN 2022

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Tahun : 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 36 entitas <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pemeriksaan disusun secara akurat dan lebih awal Penyusunan tim disusun lebih awal dan matang <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Semester II
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%				100%	Desember 2022	<p>Triwulan IV:</p> <p>Mereview <u>kesesuaian Simpulan dalam Konsep LHP Kinerja dan DTT dengan Harapan Penugasan</u>.</p>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK Pelaksanaan pembahasan TLRHP Semester I dengan mengundang entitas serta pembahasan SIPTL <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK Pelaksanaan pembahasan TLRHP Semester II dengan mengundang entitas serta pembahasan SIPTL
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan <u>alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional</u> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi terkait tema pemeriksaan tematik nasional dalam rangka persiapan pemeriksaan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persiapan SDM dan <u>sarana prasarana pemeriksaan tematik nasional</u> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tematik nasional

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan jika terdapat permintaan dari pemangku kepentingan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan jika terdapat permintaan dari pemangku kepentingan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan jika terdapat permintaan dari pemangku kepentingan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal Merumuskan pemeriksaan tematik lokal yang sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau menjadi tujuan pembangunan daerah <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun tim Pemeriksaan Tematik Lokal <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember 2022	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD. <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi atas Visi, Misi dan Nilai Dasar serta Kode Etik dalam Pengarahan Pimpinan maupun rapat - rapat yang dilaksanakan Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi atas Visi, Misi dan Nilai Dasar serta Kode Etik dalam Pengarahan Pimpinan maupun rapat - rapat yang dilaksanakan <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi nilai dasar BPK
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember 2022	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022 Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi Penyusunan LAKIP Tahun 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja					Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)		
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	25%	50%	75%	97%	Desember 2022	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persurutan dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persurutan dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persurutan dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persurutan dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan 	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25% (2 aktivitas)	37,5% (3 aktivitas)	50% (4 aktivitas)	100% (4 aktivitas)	Desember 2022	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (Diklat dan Mentoring) <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (Wawancara perekaman pengetahuan dan Mentoring) 3 Aktivitas tersebut, 2 diantaranya dilaksanakan di TW I <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (Forum Transfer Pengetahuan) 4 Aktivitas tersebut, 3 diantaranya dilaksanakan di TW I dan II <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun serta menyampaikan dokumen terkait <i>Innovative Practice</i> Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (Forum Transfer Pengetahuan) 	
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengirimkan form survey kepuasan kinerja Pemeriksa untuk pemeriksaan LKPD pada semua entitas <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengirimkan form survey kepuasan kinerja Pemeriksa untuk pemeriksaan semester II 	
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	25%	30% 40% 50%	60% 70% 75%	80% 90% 100%	Desember 2022	<p>Januari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik penzembangan kompetensi pegawai <p>Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik penzembangan kompetensi pegawai <p>Maret :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik penzembangan kompetensi pegawai <p>April :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik penzembangan kompetensi pegawai <p>Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik penzembangan kompetensi pegawai <p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik penzembangan kompetensi pegawai Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) <p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik penzembangan kompetensi pegawai 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) <p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) <p>Oktober :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) <p>November :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) <p>Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun)
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	Desember 2022	<p>atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun)</p> <p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2022 Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran Menyusun data capaian output. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran Menyusun data capaian output. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat evaluasi pengelolaan anggaran TA.2022 Semester I Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran Menyusun data capaian output. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat evaluasi pengelolaan anggaran TA.2022 Semester II Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran Menyusun data capaian output.

Keterangan:

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja
- Kolom (2) : Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerja
- Kolom (3) : Diisi dengan Target Tahun 2022
- Kolom (4) s.d. (7) : Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis, unit/satuan kerja dan juga target tahunan
- Kolom (8) : Diisi dengan rencana waktu penyelesaian
- Kolom (9) : Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja

Gambar 2.3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Berdasarkan pengukuran, Hasil Evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar **90,14**. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,00, sehingga skor yang diperoleh sebesar 105. Hasil evaluasi ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2021 (86,01). Peningkatan tersebut dapat tercapai karena adanya upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Analisis atas permasalahan pada Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
2. Dukungan dan komitmen manajemen serta pengelola kinerja di Perwakilan Jawa Tengah; dan
3. Komunikasi intensif dengan Itama terkait hal-hal yang memerlukan perbaikan.

B. Capaian Kinerja

Pengelolaan kinerja BPK dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input.

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja diinput oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya) yaitu:
 - a. *maximize* - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
 - b. *minimize* - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target;
 - c. *stabilize* - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

Color Range	Deskripsi
	Skor \geq 100
	$80 \geq$ Skor < 100
	Skor < 80

- Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator
- Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta pemantauan tindak lanjut semesteran;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap kegiatan perkantoran; dan
- Pengembangan inovasi perwakilan dalam bidang kearsipan.

Pada tahun ini, capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendapat skor **101,26**. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 99,99. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut:



Berdasarkan diagram di atas, secara umum realisasi kinerja pada Tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini meningkat dalam tiga tahun terakhir, setelah sempat menurun pada Tahun 2020 dikarenakan kondisi Pandemi *Covid-19* yang masih melanda.

Capaian kinerja atas tiga belas indikator secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

	Indikator Kinerja IKU		Target 2022	Realisasi 2022	Skor Kinerja
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Sasaran: Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan Meningkatnya	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	98, 11%
IKU 2		Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
IKU 3		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	92,47%	105,00
IKU 4		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	102,01%	102,01
IKU 5		Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100,13%	100,13
IKU 6		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,11%	101,11
IKU 7		Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,84	96,80
IKU 8		Hasil Evaluasi AKIP	88,00	90,14	102,43
IKU 9		Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	96,21%	99,19
IKU 10		Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	101,43%	101,43
IKU 11		Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,26	105,00
IKU 12		Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100,00
IKU 13		Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	90,62%	102,98

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	98,11%	86,22%	78,47%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	92,47%	87,71%	85,78%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	102,01%	100,88%	101,52%
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100,13%	100,29%	100%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,11%	100,99%	100%
Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan Meningkatnya	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,84	4,43	4,59
	Hasil Evaluasi AKIP	88,00	90,14	86,01	92,94
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	96,21%	99,18%	99,18%
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	101,43%	100%	150%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,26	4,09	3,94
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100%	97,35%
	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	90,62%	91,21%	92,26%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	98, 11%	98,11%
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	92,47%	123,29%
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	102,01%	102,01%
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,13%	100,13%
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	101,11%	101,11%
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,84	96,80%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05	90,14	100,10%
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	96,21%	99,19%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	101,43%	101,43%
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,26	112,10%
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7%	90,62%	101,02%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu:

1. hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)
2. hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan
3. hasil reviu Itama terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

Tabel 3.4 Capaian IKU 1

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	78,47%	86,22%	98,11%	-	
Capaian	78,47	86,22	98,11	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			98,11%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 98,11 dari target sebesar 100%, sehingga skor capaiannya sebesar 98,11. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formula	
(40% x a) + (50% x b) + (10% x c)	
1.1. Hasil QA dan QC Satker (a)	= 100,00%
1.1.1. Persentase Pemenuhan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan	= 5100,00%
1.1.2. Persentase Pemenuhan QA atas setiap kegiatan pemeriksaan	= 5100,00%
1.1.3. Jumlah kegiatan pemeriksaan	= 51
1.2 Hasil Evaluasi EPP (b)	= 96,22%
1.2.1. Tingkat Konsistensi atas LHP	= 94,59%
1.2.2. Tingkat Akurasi atas LHP	= 97,30%
1.3 Hasil Reviu Itama (Individual score) (c)	= 100,00
Realisasi IKU 1 =	(0,4a) + (0,5b) + ((0,1c)/100%) = 98,11%

Meskipun capaian ini belum memenuhi target, namun IKU-1 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh hasil evaluasi EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan belum mencapai 100%.

Untuk mendukung ketercapaian target ini, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu

pemeriksaan, mulai dari komitmen untuk melengkapi dokumen lembar revidi sampai dengan memastikan keakuratan dan konsistensi penyajian pada LHP yang disusun.

Upaya lain yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses revidi secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebesar Rp7.880.775.000 untuk 47 LHP yang di periksa oleh internal Pemeriksa BPK dan Rp2.014.210.000 untuk empat LHP yang di periksa oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

Tabel 3.5 Capaian IKU 2

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100%	-	
Capaian	100	100	100	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	-	-	100%	-	

**) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)*

Pada tahun 2022, realisasi atas IKU 2-Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan adalah sebesar 100%. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga skor capaiannya sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas LHP baik.

Realisasi IKU-2 Tahun 2022 konsisten selama tiga tahun terakhir. Capaian tersebut menunjukkan dukungan dan komitmen seluruh unsur dari Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dalam memenuhi tujuan dan simpulan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan serta Harapan Penugasan.

Peran unsur-unsur tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar LHP BPK mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk kepentingan publik yang dilaksanakan secara efektif, ekonomis dan efisien.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya senantiasa menjaga komitmen manajemen untuk mewujudkan kesesuaian hasil pemeriksaan dengan harapan penugasan. Perwujudan komitmen ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan berupa *in-house training, knowledge transfer forum*, atau rapat-rapat pengarahan antara manajemen dengan para pemeriksa sehingga dapat terwujud sinergi dalam menjaga komitmen.

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan telah sesuai dengan target Tahun 2022. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebesar Rp2.914.755.000, dengan rincian Pemeriksaan Kinerja sebesar Rp 1.882.448.000 dan Pemeriksaan DTT sebesar Rp1.032.307.000.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada auditee sejak Tahun 2005.

Tabel 3.6 Capaian IKU 3

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi *)	85,78%	87,71%	92,47%	-	
Capaian	105	105	105	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	-	-	123,29%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 3 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 92,47% dari target sebesar 75%, sehingga skor capaiannya sebesar 105. Hal ini mengindikasikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Secara rinci, penghitungan persentase atas IKU-3 sebagai berikut:

Formula			
$((a + d) / e) \times 100\%$			
3.1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (a)	=	28.119	
3.2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (b)	=	2.206	
3.3. Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (c)	=	91	
3.4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (d)	=	77	
3.5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke <i>auditee</i> (e)	=	30.493	
Realisasi IKU 3	=	$((a+d)/e) \times 100\%$	= 92,47%

Realisasi pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian target ini didukung oleh komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan para *stakeholder* untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Sesuai revisi RKP Tahun 2022 alokasi anggaran untuk IKU ini sebesar Rp445.977.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp443.709.900,00 (99,49%).

Untuk mempertahankan capaiannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya untuk mengupayakan langkah-langkah strategis dan simultan dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain itu, BPK Perwakilan Jawa Tengah melalui dosir-dosir entitas senantiasa mengingatkan kepada Inspektorat tiap daerah sebagai *counterpart* untuk selalu memperbarui data tindak lanjut melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan untuk pengukuran IKU ini adalah LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.

Tabel 3.7 Capaian IKU 4

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	101,52%	100,88%	102,01%	-	
Capaian	101,52	100,88	102,01	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	-	-	102,01%	-	

**) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)*

Realisasi IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2022 adalah sebesar 102,01% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 102,01. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh program-program pemeriksaan nasional.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung dengan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pemeriksaan tematik nasional, salah satunya Pemeriksaan Efektivitas Sistem Pencegahan Korupsi dan Stranas PK.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk terus mendukung pemeriksaan tematik nasional dalam bentuk perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemeriksaan.

Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional telah melebihi target Tahun 2022. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Sumber data yang digunakan sebagai pengukuran yaitu Surat Permintaan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, Surat Tugas Pemeriksaan, LHP, dan Surat Keluar Penyampaian LHP.

Tabel 3.8 Capaian IKU 5

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100,29%	100,13%	-	
Capaian	100	100,29	100,13	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,13%	-	

**) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)*

Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 adalah sebesar 100,13% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,13. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selalu hadir untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan melalui pemeriksaan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 tetap dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selalu melaksanakan pemeriksaan yang memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk selalu tanggap atas isu-isu yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan dan mewujudkannya dalam bentuk pemeriksaan.

Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan telah melebihi target Tahun 2022. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal **satu kali** dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's, dengan sumber data pengukuran LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.

Tabel 3.9 Capaian IKU 6

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100,99%	101,11%	-	
Capaian	100	100,99	101,11	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			101,11%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 adalah sebesar 101,11% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 101,11. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki sensitivitas terhadap isu-isu di daerah Jawa Tengah, dan meresponnya dengan pemeriksaan tematik lokal.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selalu menyesuaikan pemeriksaan dengan isu-isu strategis di daerah. Untuk mempertahankan capaian atas IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk terus responsif atas isu kekinian di wilayah kerjanya.

Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal telah sesuai target Tahun 2022. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Tabel 3.10 Capaian IKU 7

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi *)	4,59	4,43	4,84	-	
Capaian	91,80	88,60	96,80	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			96,80%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 adalah sebesar 4,84 dari target sebesar 5,00 sehingga skor capaiannya sebesar 96,80. Meskipun belum memenuhi target, namun realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai – nilai dasar BPK telah menjadi budaya kerja yang mulai diterapkan dengan baik oleh para pegawai. Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya:

- 1) Mengadakan sosialisasi atas implementasi nilai dasar BPK
- 2) Meningkatkan pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan di BPK
- 3) Memberikan *reward* dan *punishment* secara adil terhadap pelaksanaan implementasi nilai dasar
- 4) Memberikan pendampingan implementasi nilai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan
- 5) Meningkatkan implementasi nilai dasar secara konsisten dan berkesinambungan

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam pengukuran indikator ini adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi *digital*. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak *surveyor*. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak *surveyor* berupa efisiensi tenaga *surveyor*, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*.

Realisasi IKU-7 telah mencapai 96,80% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sumber data pengukuran yang digunakan adalah hasil evaluasi AKIP dari Itama. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Capaian IKU 8

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86,00	86,00	88,00	89,00	90,05
Realisasi *)	92,94	86,01	90,14	-	
Capaian	105	98,86	102,43	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,10%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki aktivitas kegiatan yang beragam. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Realisasi IKU-8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 sebesar 90,14 dari target sebesar 88%, sehingga skor capaiannya sebesar 102,43. Peningkatan capaian ini merupakan hasil kerja keras Perwakilan Jawa Tengah dengan satuan kerja lain yang terkait dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama. Kami berkomitmen akan menjaga capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU ini diukur berdasarkan pemanfaatan layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiPTL, dan SiAP).

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh unit kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

1. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (20%) diukur dari pembaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu unit kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.
2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (15%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Eselon IV dalam satu unit kerja.
3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (20%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SMP dalam satu unit kerja Pemeriksaan.
4. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (20%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP untuk setiap Tim Pemeriksa dalam satu unit kerja.
5. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (25%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiPTL dan tingkat validasi level satuan kerja atas data tindak lanjut yang diinput entitas.

Tabel 3.12 Capaian IKU 9

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi *)	99,18%	99,18%	96,21%	-	
Capaian	104,39	103,31	99,19	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			99,19%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 adalah sebesar 96,21% dari target sebesar 97%, sehingga capaiannya sebesar 99,19. Secara rinci dapat dijelaskan pada formulasi berikut:

Formula		
a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM	=	99,76%
b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN	=	89,35%
c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP	=	98,28%
d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP	=	91,01%
e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL	=	100,00%
Realisasi IKU 9 =	(20% x a) + (15% x b) + (20% x c) + (20% x d) + (25% x e)	= 96,21%

Realisasi IKU-9 pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemanfaatan aplikasi JASMIN tidak selesai sampai tahap tindaklanjut (tindaklanjut masih dikerjakan secara manual). Sedangkan pada pemanfaatan aplikasi SiAP, proses pengerjaan HP3 belum semua tim menyelesaikannya.

Namun demikian realisasi ini telah mencapai 99,19% dari target Tahun 2024. Atas ketidaktercapaian tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan capaian dengan mengingatkan kepada para Pejabat Eselon IV dan Pemeriksa agar menyelesaikan setiap proses log akses aplikasi juga secara berkala akan dilakukukan monitoring atas pemanfaatan layanan aplikasi-aplikasi tersebut.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Innovative Practice menekankan pada inovasi/kebaruan/*update* atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

1. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update*.
2. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit Kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update* atas BP yang diimplementasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan,

komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Laporan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang mencakup:

- a. Usulan *Best Practice*
- b. Laporan atas Penerapan *Best Practice*
- c. Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan

Tabel 3.13 Capaian IKU 10

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	150%	100%	101,43%	-	
Capaian	105	100	101,43	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			101,43%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 adalah sebesar 101,43% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 101,43. Hal ini mengindikasikan bahwa Manajemen Pengetahuan telah diterapkan dan didokumentasikan dengan baik di BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Realisasi IKU Tingkat Penerapan manajemen Pengetahuan selama dua tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan. Diharapkan capaian baik ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun Renstra BPK 2020-2024. Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reu pascaaktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK antara lain pemanfaatan portal intranet BPK dan aplikasi JASMIN untuk mengunggah usulan *best practice*. Manfaat yang diperoleh adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang serta kemudahan akses bagi satker yang akan mereplikasi *best practice*.

Peningkatan capaian akan semakin baik jika didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain.

- 1) Peningkatan pemahaman atas *knowledge management* dan best practice;
- 2) Sistem *rewarding* atas usulan *Best Practice* dari satker yang terpilih menjadi *Best Practice* level BPK Wide secara lebih memadai;
- 3) Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait *knowledge management* dan *best practice* yang melibatkan satker di lingkungan BPK;
- 4) Penentuan prioritas kegiatan terkait pembangunan portal *knowledge management* terutama dalam hal kebutuhan penyempurnaan pembangunan portal sebagai sarana/media *best practice sharing*.

Pengelola dan pihak-pihak terkait pelaksanaan IS *Best Practice Sharing* diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan *best practice* sesuai dengan Roadmap Implementasi Manajemen Pengetahuan BPK yang telah disusun, sehingga pelaksanaan best practice di BPK dapat terimplementasi secara menyeluruh.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK.

Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui **survei oleh lembaga independen** yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) termasuk responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor BPK Perwakilan wilayah barat dan timur.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut:

1,00 - 1,99	sangat tidak memuaskan
2,00 - 2,99	tidak memuaskan
3,00 - 3,99	memuaskan
4,00 - 5,00	sangat memuaskan

Tabel 3.14 Capaian IKU 11

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi *)	3,94	4,09	4,26	-	
Capaian	103,68	105	105	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			112,10%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2022 adalah sebesar 4,26 dari target sebesar 3,80, sehingga skor capaiannya sebesar 105.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dan meningkat selama tiga tahun terakhir. Ketercapaian tersebut didukung oleh kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan yang dibangun secara berkelanjutan, baik oleh jajaran manajemen, para pemeriksa pada saat pemeriksaan, atau staf lain melalui sarana kehumasan BPK.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk terus membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi telah melebihi target Tahun 2022. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Sejak Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, antara lain melalui pengalihan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (online) melalui *e-learning* dan *Learning Management System (LMS)* sebagai penyesuaian selama kondisi pandemi COVID-19, memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari kualitas layanan sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran.

Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama.

Manfaat pelaksanaan diklat secara daring (*online*) antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN) dan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
2. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut-off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Tabel 3.15 Capaian IKU 12

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	97,35%	100%	100%	-	
Capaian	97,35	100	100	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga skor capaiannya sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh pegawai telah terpenuhi jam diklatnya selama Tahun 2022.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 konsisten seperti tahun sebelumnya. Ketercapaian ini karena komitmen seluruh pegawai untuk terus mengembangkan kompetensinya, juga dukungan serta peran serta Pimpinan (atasan langsung) dan subbag SDM yang pro aktif dalam melakukan monitoring jam diklat pegawai.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara berkala akan melakukan monitoring jam diklat, mengadakan Diklat Pembekalan bagi para Pemeriksa yang akan melaksanakan Pemeriksaan LKPD serta mengikutsertakan diklat secara daring bagi Pemeriksa di sela-sela waktu diluar kegiatan pemeriksaan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara rutin juga mengadakan diklat bertema Kesekretariatan bagi para pegawai untuk mendukung kegiatan rutin kesekretariatan.

Realisasi IKU-12 konsisten selama dua tahun terakhir. Atas capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen akan mempertahankan capaian ini hingga Tahun 2024.

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek **implementasi Kinerja Anggaran**. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan
3. Pencapaian output
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi **pelaksanaan anggaran belanja** pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 3.16 Capaian IKU 13

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50%	89,70%
Realisasi *)	92,26%	91,21%	90,62%	-	
Capaian	105	104,24	102,98	-	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			101,02%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 90,62% dari target sebesar 88%, sehingga capaiannya sebesar 102,98.

Ketercapaian ini didukung oleh komitmen dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama Subbag Keuangan dalam melakukan monitoring atas penyerapan anggaran.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya memonitor anggaran dengan mempertimbangkan aspek penyerapan anggaran, konsistensi kesesuaian penyerapan terhadap perencanaan, fokus pada output serta efisiensi.

Realisasi IKU -13 sebesar 90,62% telah melebihi target Tahun 2022. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

D. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, dan sumber daya manusia sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Penggunaan aplikasi BPK di antaranya Jasmin, SiAP LK, dan SiPTL memberikan manfaat efisiensi di antaranya efisiensi anggaran untuk ATK, efisiensi waktu, dan kecepatan pelayanan;
 - b. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* untuk melaksanakan komunikasi dengan *stakeholder* atau rapat-rapat internal dapat mengefisienkan anggaran makan dan minum.
2. Pengelolaan BMN,
 - a. Adanya inovasi berupa pemusnahan arsip kelas 4, memberikan manfaat berupa efisiensi penggunaan ruangan arsip;
 - b. Pemanfaatan fitur *file sharing* melalui jaringan internal BPK Perwakilan Jawa Tengah meminimalisir ruang penyimpanan arsip *hardcopy*.
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran
 - a. Sisa anggaran pemeriksaan dialihkan untuk perjalanan dinas non pemeriksaan
 - b. Alokasi biaya konsinyering dialihkan untuk penambahan output Pemeriksaan pada Semester II Tahun 2022
 - c. Penghapusan anggaran honorarium

4. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka efisiensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya menggunakan pemeriksa di luar BPK (KAP) yang bekerja untuk/dan atas nama BPK. Hal ini berdampak pada optimalnya alokasi pemeriksa untuk tiap entitas pemeriksaan.

Entitas pemeriksaan yang menggunakan KAP pada Tahun 2022 adalah: Kab.Karanganyar, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Salatiga.

E. Perubahan Budaya Kerja

Salah satu kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk mengaplikasikan penerapan nilai-nilai dasar tersebut adalah **Jogo Konco** yaitu saling menjaga antar pegawai maupun antar unit kerja agar IIP terwujud serta saling menghargai dan mendukung profesi sesuai tupoksi masing-masing pegawai maupun antar unit kerja agar tercapainya sinergi, serta **Jateng Produktif** yaitu meningkatkan kerjasama antar pegawai maupun antar unit kerja guna mewujudkan kinerja yang tinggi dengan berpegang teguh pada IIP.

Penerapan IIP saat ini di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian penerapan IIP perlu terus dijaga dan ditingkatkan dengan adanya upaya saling dukung dari seluruh pegawai maupun unit kerja terkait. Dalam mewujudkan budaya kerja Jogo Konco dan Jateng Produktif, dibentuk tim pengembangan dan penerapan budaya kerja. Tim ini melakukan sosialisasi budaya kerja di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya:

1. Kristalisasi motto "**Jogo Konco untuk Jateng Produktif**" menjadi 3 perilaku yaitu Jogo Rogo, Jogo Roso dan Jogo Toto:
 - a. Jogo Rogo: bersama-sama antar elemen pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjaga kondisi raga/badan yang sehat;
 - b. Jogo Roso: saling bekerja sama memberi suasana positif dan kenyamanan bekerja, sehingga secara psikologis pegawai merasa aman, tenang dan damai sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja; dan
 - c. Jogo Toto: Mempedomani aturan sebagai penjabaran tata tertib sebagai dasar pelaksanaan perilaku seluruh pegawai, baik yang berhubungan dengan perilaku individu maupun perilaku yang berhubungan dengan kedinasan serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.
2. Internalisasi Budaya kerja dan nilai-nilai BPK Jateng ke seluruh pegawai.

F. Realisasi Anggaran

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 anggaran yang telah terealisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi sebesar Rp44.349.764.584 (98,91%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Keluaran	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi			Indikator Kinerja
			Anggaran	Prosentase	Output	
	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian	Rp 44.837.781.000	Rp 44.349.764.584	98,91%	647	
	Layanan Perkantoran					
1	Layanan Perkantoran	Rp 23.823.156.000	Rp 23.706.789.322	99,51%	1	
2	Layanan Prasarana Internal	Rp 478.581.000	Rp 478.579.050	100,00%	2	
	Pemeriksaan Keuangan					
1	LHP atas Banparpol pada BPK Perwakilan Jawa Tengah	Rp 684.730.000	Rp 664.143.702	96,99%	313	
2	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	Rp 2.014.210.000	Rp 2.001.364.037	99,36%	4	IKU 1
3	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp 12.644.000	Rp 12.600.000	99,65%	1	
4	Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp 98.276.000	Rp 97.412.175	99,12%	2	
5	Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp 25.020.000	Rp 25.015.300	99,98%	36	
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp 445.977.000	Rp 443.709.900	99,49%	72	IKU 3
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Jawa Tengah	Rp 410.924.000	Rp 379.336.410	92,31%	72	IKU 5
8	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Rp 1.094.765.000	Rp 1.037.334.122	94,75%	12	
9	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp 1.335.048.000	Rp 1.329.995.877	99,62%	20	
10	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Rp 7.880.775.000	Rp 7.750.613.929	98,35%	47	IKU 1 IKU 2 IKU 4 IKU 6
11	LHP Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Rp 6.533.675.000	Rp 6.422.870.760	98,30%	65	

G. Inovasi

Inovasi yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan telah diterima sebagai Usulan *Best Practice* adalah **“Kegiatan Penyusutan (Pemusnahan) Arsip Kategori Kelas 4 (Arsip Tidak Berguna) agar Ruang Penyimpanan Arsip Menjadi Efektif dan Efisien”**. Hasil pelaksanaan inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara kuantitatif dan kualitatif hasil konkret yang dapat dirasakan bahwa ruang penyimpanan arsip aktif (*Central File*) di masing-masing Unit Kerja terasa lebih longgar, dan arsip yang disimpan adalah hanya arsip yang penting dan berguna bagi unit kerja (dhi. BPK Perwakilan Provinsi Jateng), arsip yang disimpan sudah terbebas dari arsip kelas 4;
2. Perubahan signifikan yang dirasakan oleh para Pegawai di Unit Kerja yang telah melaksanakan kegiatan penyusutan (pemusnahan) arsip kategori kelas 4 ini adalah tempat penyimpanan arsip aktif (*Central File*) sekarang tidak lagi dipenuhi dengan tumpukan arsip yang tidak jelas indeks klasifikasi arsipnya.

H. Perhargaan

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. KIP Award 2020 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan peringkat “Menuju Informatif”;
2. Peringkat I Kualitas Pelaporan BMN Terbaik Tahun 2021 oleh KPKNL Semarang;
3. Peringkat I LHP Kinerja Terbaik Tahun 2021;
4. Peringkat I Satker terbaik atas Kinerja Pengelola Keuangan Tahun 2020;
5. Peringkat I SDM Award 2022 kategori Pemutakhiran Data Mandiri Terbaik;
6. Peringkat II SDM Award 2022 kategori Pengelolaan PAK Terbaik;
7. Peringkat I Pengelola UJDIH Tahun 2021;
8. Peringkat I Pengelola Database Peraturan BPK Tahun 2021; dan
9. Juara I Lomba Video Sejarah BPK Kategori Perwakilan Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Museum BPK RI.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh unit kerja yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang dioperasionalisasikan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen PK Tahun 2022, pencapaian Skor Kinerja BPK pada Tahun 2022 adalah sebesar **101,26**. Capaian IKU selama lima tahun terakhir tersaji sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian IKU selama Lima Tahun Terakhir

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Skor Kinerja	100,14	101,52	99,92	99,99	101,26

Sesuai tabel di atas, capaian kinerja Tahun 2022 mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir dan meningkat sebesar 1,25% dari tahun sebelumnya. Atas capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada IKU-IKU yang belum terpenuhi targetnya. Adapun kinerja yang belum terpenuhi antara lain:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja yang belum tercapai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Hambatan	Tindak Lanjut
1	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	98,11%	tingkat konsistensi dan akurasi LHP belum memenuhi 100%	Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mulai dari komitmen untuk melengkapi dokumen lembar revidu sampai dengan memastikan keakuratan dan konsistensi penyajian pada LHP yang disusun
2	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,84	Pemahaman atas penerapan nilai-nilai dasar BPK	a. Mengadakan sosialisasi terkait implementasi Nilai Dasar BPK b. Memberikan reward dan punishment secara adil terhadap pelaksanaan implementasi nilai dasar
3	IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,00%	96,21%	a. Pemanfaatan aplikasi JASMIN tidak diselesaikan sampai tahap tindaklanjut (tindaklanjut masih dikerjakan secara manual) b. pemanfaatan aplikasi SiAP, proses pengerjaan HP3 belum semua tim menyelesaikannya	a. mengingatkan kepada para Pejabat Eselon IV dan Pemeriksa agar menyelesaikan setiap proses log akses aplikasi b. secara berkala akan dilakukukan monitoring atas pemanfaatan layanan aplikasi-aplikasi tersebut

Untuk menyempurnakan skor kinerja tahun-tahun berikutnya maka diperlukan perbaikan di antaranya meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja, meningkatkan kualitas Laporan Hasil pemeriksaan serta perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja dalam membantu pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Semarang, 31 Januari 2023

Manajer IKU

Bagus Kurniawan
NIP. 197710131999111001

Mengetahui ,
Kepala Perwakilan

Hari Wiwoho
NIP. 196810011996031003



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

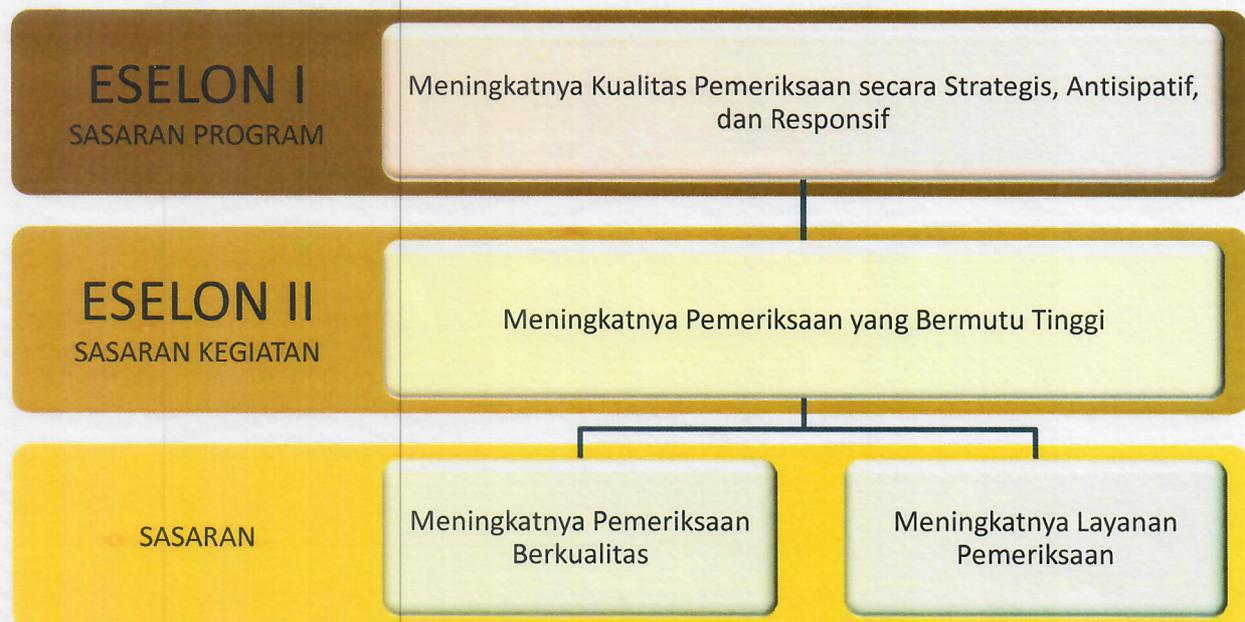
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

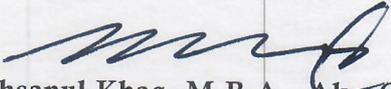


INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

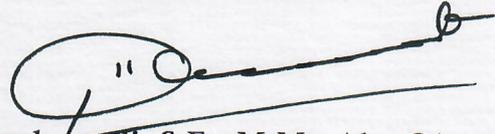
Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp43.248.581.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp18.067.629.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp25.180.952.000	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Januari 2022

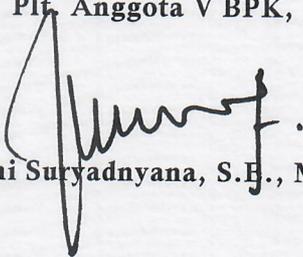
Pihak Kedua,


Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE.,
CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.

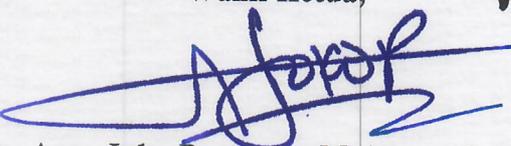
Pihak Pertama,


Ayuh Amali, S.E., M.M., Ak., CA.,
CSFA.

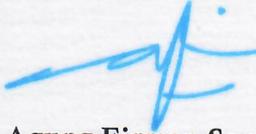
Diketahui oleh:
Plt. Anggota V BPK,


Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua,


Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Ketua,


Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,
CFrA., CGCAE., QGIA.

Target Indikator Kinerja dalam Lima Tahun sesuai Renstra

Target Kinerja berisi rincian indikator kinerja beserta target yang diharapkan untuk dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5
Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7%



**BERITA ACARA VALIDASI
VALIDASI DATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022**

SATKER : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

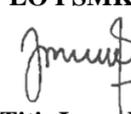
NAMA IKU		SEBELUM VALIDASI (Data pada periode penginputan s.d tgl 13 Januari 2023)		SETELAH VALIDASI (HASIL KOREKSI)		CATATAN
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	40%	100%	98,11%	- Terdapat data dukung Pemenuhan QA dan QC belum terlampir dan belum disahkan Data dukung telah lengkap dan sesuai - Input data hasil Evaluasi LHP EPP dan reviu Itama
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100,00%	Sesuai
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	89,68%	75%	92,47%	Penyesuaian dengan data EPP
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	102,01%	Penambahan alokasi skor
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100,13%	Penambahan alokasi skor
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	101,11%	Penambahan alokasi skor
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,84	5,00	4,84	Sesuai
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	88,00	90,14	88,00	90,14	Sesuai
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	96,21%	97%	96,21%	Sesuai
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	101,43%	100%	101,43%	Sesuai
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,26	3,80	4,26	Sesuai
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100%	100,00%	Terdapat sertifikat yang belum terlampir sehingga belum dapat diakui pemenuhan jam diklatnya Data dukung telah lengkap dan sesuai
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,62%	88%	90,62%	Sesuai

Jakarta, 30 Januari 2023

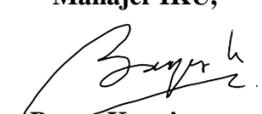
Kepala Seksi MAKIN I,


Sonia Moeharjono Puteri
NIP 198005252007082001

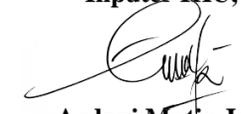
LO PSMK,


Titis Imanda
NIP 198404282007082001

Manajer IKU,


Bagus Kurniawan
NIP 197710131999111001

Inputer IKU,


Ardani Mutia Jati
NIP 198506152003122004

Inputer IKU,


Dimaz Okky Primandita
NIP 198610292009011003